

PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

*Agung Eko Purwana**

Abstrak: *Pembangunan ekonomi adalah salah satu strategi untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bangsa ini. Pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita penduduk, jumlah pengangguran, tingkat kemiskinan, dan neraca pembayaran adalah ukuran-ukuran yang dicapai dalam menilai tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi. Namun pada kenyataannya pembangunan yang dilaksanakan belum membuahkan hasil yang optimal karena masih belum memihak kepada masyarakat banyak. Meningkatnya kemiskinan dan pengangguran yang saat ini terjadi, pada akhirnya menuntut semua pihak merumuskan kembali strategi pembangunan yang sesuai untuk diterapkan di negeri ini. Sehingga tidak terdapat lagi masyarakat yang terabaikan. Para pakar ekonomi, sosial, dan politik mulai banyak melakukan kajian-kajian tentang bagaimana menjadikan pembangunan yang berhasil tanpa dihantui oleh adanya kemiskinan dan pengangguran. Hal yang menarik dalam kajian-kajian tersebut justru datang dari para ulama dan ekonom muslim. Mereka menawarkan alternatif-alternatif baru yang seiring dengan munculnya teori-teori baru tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam yang berlandaskan ajaran syari'ah Islam memang menuntut kepada para pemeluknya untuk berlaku secara professional yang dalam prosesnya menampilkan kerapian, kebenaran, ketertiban, dan keteraturan. Berangkat dari paparan diatas, tulisan ini hendak mengkaji bagaimana perspektif ekonomi Islam tentang pembangunan yang dapat memecahkan permasalahan-permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan pemerataan.*

Kata kunci: *Merdeka, Kerjasama, Berubah, dan Mandiri*

* Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo

PENDAHULUAN

Di era reformasi ini, Pemerintah dan bangsa Indonesia telah banyak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki pelaksanaan pembangunan yang selama ini dilakukan oleh orde baru. Namun pada kenyataannya masih belum membuahkan hasil yang optimal karena masih belum memihak kepada masyarakat banyak. Meningkatnya kemiskinan dan pengangguran yang saat ini terjadi menuntut semua pihak merumuskan kembali strategi pembangunan yang sesuai untuk diterapkan di negeri ini. Sehingga tidak terdapat lagi masyarakat yang tergeser, terjepit, dan terpinggirkan.

Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti itu, pembangunan disejajarkan dengan kata perubahan sosial. Bagi penganut pemahaman ini konsep pembangunan adalah berdiri sendiri sehingga membutuhkan keterangan lain, seperti pembangunan model kapitalisme, pembangunan model sosialisme, ataupun pembangunan model Indonesia, dan seterusnya. Dalam pengertian seperti ini teori pembangunan berarti teori sosial ekonomi yang sangat umum. Pandangan ini menjadi pandangan yang menguasai hampir setiap diskursus mengenai perubahan sosial.¹

Pembangunan bidang ekonomi adalah salah satu strategi untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bangsa ini. Bidang ekonomi adalah salah satu bidang yang menjadi perhatian

¹ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi* (Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar, 2003), 10.

serius dan sangat strategis karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Berbagai perencanaan pembangunan selalu mengarah pada penguatan bidang ekonomi ini. Indikator keberhasilan pembangunan suatu negarapun dapat dilihat pada ketercapaian target-target ekonominya. Pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita penduduk, jumlah pengangguran, tingkat kemiskinan, dan neraca pembayaran adalah ukuran-ukuran yang dicapai dalam menilai tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi.²

Pelaksanaan pembangunan ekonomi pada realisasinya perlu membangkitkan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik daerah dan mayoritas utama pekerjaannya. Pendekatan industrialisasi (kapitalis) yang diterapkan selama ini lebih mengedepankan pada padat modal yang tidak memihak kepada masyarakat banyak. Sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak mencerminkan kemampuan dan keahlian masyarakat.³

Pentingnya koordinasi kebijakan berkaitan dengan masih adanya beberapa permasalahan mendasar dalam perekonomian yang belum dapat diatasi dengan segera, seperti permasalahan struktural di sisi penawaran dan pembinaan UMKM. Koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah akan diprioritaskan pada upaya untuk mendukung penguatan kelembagaan ekonomi guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kegiatan perekonomian secara luas. Disamping

² Revrisond Baswir, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 7-8.

³ Ina Primiana, *Mendorong Tumbuhnya Ekonomi Kerakyatan dalam Menumbuhkan UMKM dalam Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri* (Bandung : Alfabeta, 2009), 63

koordinasi kebijakan moneter dan fiskal untuk stabilisasi makroekonomi, sejumlah langkah koordinasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan hubungan investor luar negeri dan perangkat Indonesia, dukungan intermediasi perbankan, dan memperdalam sektor keuangan domestik. Kajian sektor-sektor ekonomi dan komoditas -komoditas unggulan melalui hasil survei maupun Kajian Ekonomi Regional (KER) juga terus dilakukan oleh Kantor-kantor Bank Indonesia di berbagai daerah.⁴

Berbagai upaya oleh semua pihak, baik itu pemerintah, industri, maupun para pengusaha adalah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Namun tujuan kesejahteraan ini dalam pelaksanaannya tidaklah mudah tercapai. Banyak kendala-kendala yang menghadang jalannya proses pembangunan yang menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan. Pada akhirnya ada sebagian masyarakat yang dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan ada sebagian yang belum mendapatkannya.

Dalam kehidupan memang akan terjadi perbedaan dan kesenjangan ekonomi atau rezeki diantara pelaku ekonomi, karena hal tersebut merupakan sunnatullah. Kondisi inilah yang secara religius akan menciptakan mekanisme ekonomi, yang berlebihan menolong yang kekurangan sehingga kesenjangan akan semakin menyempit walaupun tidak bisa dihilangkan sama sekali. Dengan demikian hanya dengan tolong menolong dan saling memberilah, maka kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi, karena yang kaya membutuhkan yang miskin dan sebaliknya yang miskin membutuhkan yang kaya.⁵

⁴ Bank Indonesia, *Ringkasan Eksekutif Memperkuat Ketahanan, Mendorong Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional* (Jakarta: 2009), 11.

⁵ Muhammad Nafik HR, *Benarkah Bunga Haram ? Perbandingan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil & Dampaknya pada Perekonomian* (Surabaya : Amanah Pustaka, 2009), 16.

Kesejahteraan, pertumbuhan, dan perkembangan perekonomian adalah tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pembangunan ekonomi dinegara-negara berkembang tersebut pada saat ini mengalami banyak kegagalan. Dalam perspektif ide atau gagasan, ternyata pembangunan yang dilaksanakan banyak mengadopsi paham kapitalisme.⁶ Oleh karena itu negara-negara ini mulai berhati-hati untuk tidak melakukan sepenuhnya ide yang muncul dari sistem kapitalisme ini.

Ditengah kegagalan pembangunan yang berlandaskan pada sistem kapitalisme dunia ini muncullah sebuah alternatif sistem ekonomi yang berbasiskan pada nilai-nilai ajaran syari'ahIslam. Pada saat krisis ekonomi moneter melanda dunia, lembaga-lembaga ekonomi dinegara-negara berkembang yang menerapkan mekanisme syari'ah terbukti dapat bertahan dan bahkan disebagiannya mampu untuk dapat tumbuh dan berkembang.⁷

Dalam teori-teori ekonomi, nilai-nilai yang ditawarkan ekonomi Islam tergolong hal yang baru. Meskipun pada kenyataannya ajaran Islam memberikan petunjuk-petunjuknya dalam beraktivitas ekonomi tetapi secara bangunan ilmu masih membutuhkan proses untuk menjadi mapan. Termasuk dalam hal ini adalah cabang-cabang dari ilmu ekonomi sendiri, yang pada perkembangan berikutnya juga muncul sebagai alternatif dan menjadi bagian dari ekonomi Islam. Muncul dan berkembangnya ilmu ekonomi Islam ini turut memberikan alternatif pemecahan masalah yang berlarut-larut akibat dari

⁶ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), 6.

⁷ M. Lutfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah* (Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2003), 47.

mengusung gagasan kapitalisme yang mengalami kegagalan. Disisi lain ajaran syari'ah Islam memang menuntut para pemeluknya untuk berlaku secara professional yang dalam prosesnya menampilkan kerapian, kebenaran, ketertiban, dan keteraturan.⁸

Seiring dengan permasalahan pembangunan yang belum menunjukkan hasil yang optimal sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, maka terdapat hal yang perlu mendapatkan jawaban tentang bagaimana ekonomi Islam memberikan alternatif dalam memecahkan persoalan-persoalan pembangunan tersebut. Oleh karenanya, penulis bermaksud mengkaji perspektif ekonomi Islam tentang pembangunan. Dalam penulisan ini, diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan pembangunan terutama yang berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, dan pemerataan.

EKONOMI PEMBANGUNAN

Ekonomi pembangunan merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang bersifat terapan (*applied economics*). Cabang ilmu Ekonomi ini lahir setelah terjadinya perang dunia kedua atau dua abad setelah lahirnya ilmu ekonomi pada tahun 1776 Masehi. Ilmu ini diperlukan dalam rangka memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Negara-negara yang baru merdeka. Pada umumnya negara-negara ini adalah negara yang sedang berkembang dan menghadapi masalah kemiskinan, kebodohan, pengangguran, keterbelakangan, dan ketertinggalan dalam semua aspek kehidupan. Oleh karenanya mereka bermaksud

⁸ Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek* (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), 1.

mengatasi masalah-masalah tersebut hingga cepat, tepat, dan tuntas.

Berlandaskan kepada kedua-dua sifat dasar ini, maka analisa ekonomi pembangunan dapatlah didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisa masalah-masalah yang dihadapi oleh Negara-negara berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu supaya Negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat lagi.⁹

Dalam perkembangannya, para ahli memberikan pengertian atau batasan tentang ekonomi pembangunan berdasarkan latar belakang tersebut. Ekonomi pembangunan adalah suatu studi yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di negara-negara yang sedang berkembang, dengan memecahkan masalah-masalah utamanya, yakni kemiskinan, pengangguran dan pemerataan.¹⁰

Pembangunan dinegara-negara berkembang pada pelaksanaannya telah memunculkan pola, metode, atau model yang berbeda-beda diantara mereka. Perbedaan ini telah menjadi paradigma atau pandangan yang mendunia dalam melaksanakan pembangunan (*world view*). Diantara paradigma pembangunan di negara-negara berkembang tersebut adalah :¹¹

⁹ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (Jakarta: Bima Grafika dan LP FE UI, 1985), 11-12.

¹⁰ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam, Sebuah Studi Komparasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 8-13.

¹¹ *Ibid.*, 39-48.

1. **Paradigma dengan Pertumbuhan Maksimal (*Maximal Growth Paradigm*)**

Pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya adalah orientasi dari paradigma ini. Dengan memanfaatkan investasi dan teknologi, paradigma ini berharap dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ukuran yang digunakan untuk merencanakan atau menghitung pertumbuhan adalah produk nasional bruto (*Gross National Product /GNP*). Sedangkan asumsi yang dipakai adalah tetesan kebawah (*Trickle Down Effect*), yakni pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan diikuti oleh pemerataan.

Pada perkembangannya, konsep tetesan kebawah yang diharapkan oleh negara-negara yang menggunakan paradigma ini tidak terjadi. Paradigma ini justru meningkatkan ketimpangan (*inequality*) yang makin mendalam antara kelompok yang kaya dengan kelompok yang miskin. Dengan kata lain, paradigma ini dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonomi tetapi gagal dalam pemerataan. Padahal yang diharapkan tidak sekedar memaksimalkan produktivitas, tetapi juga mengatasi masalah ketimpangan antar kelompok.

2. **Paradigma Pertumbuhan dengan Pemerataan (*Distribution with Growth Paradigm*)**

Paradigma ini muncul untuk merespon kegagalan paradigma yang pertama dengan memasukkan unsur pemerataan di dalamnya agar tidak terjadi kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Dengan memanfaatkan investasi, teknologi, dan pengukuran yang sama, paradigma ini juga telah dilaksanakan oleh Negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pada

masa pemerintahan orde baru, paradigma ini dikenal dengan delapan jalur pemerataan.

Pada pelaksanaannya, paradigma ini juga tidak berhasil menyelesaikan masalah-masalah pembangunan di negara-negara berkembang. Hal ini diduga diakibatkan oleh pendekatan makro dan ketidaksiapan sumber daya manusianya yang tidak sungguh-sungguh berorientasi pada kelompok sasaran (penduduk miskin). Budaya korupsi menjadi salah satu faktor dominan penyebab bocornya anggaran pembangunan yang diperuntukkan rakyat kecil atau miskin. Disisi lain masyarakat miskin juga belum siap memperbaiki sikap mentalnya, sehingga berapapun modal yang diberikan, akan habis dan tidak merubah nasib mereka. Oleh karenanya pendekatan makro yang bertujuan memperbaiki ekonomi rakyat kecil tanpa mempersiapkan SDMnya, maka akan menemui kegagalan juga.

3. **Paradigma dengan Pendekatan Kebutuhan Pokok (*Basic Needs Approach*)**

Paradigma dengan kebutuhan pokok sebagai pendekatannya merupakan upaya untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan kelompok sosial. Paradigma ini berharap bahwa semua semua kelompok target dapat terpenuhi kebutuhannya, seperti pangan, papan (rumah), dan pendidikan, dan kesehatan. Anggaran yang dikurcurkan oleh pemerintah dapat mengatasi kebutuhan masyarakat dengan baik.

Pada saat anggaran terbatas, pemerintah tidak lagi memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Akibatnya masyarakat kembali tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Akhirnya pardigma ini gagal sebagaimana pada paradigma sebelumnya. Hal ini

terjadi karena penduduk miskin tidak bisa merubah nasibnya, kecuali dengan mengharap bantuan dari pemerintah.

4. **Paradigma dengan Fokus Pembangunan Sumber Daya Manusia (*Human Development Paradigm*)**

Belajar dari paradigma pembangunan yang mengalami kegagalan sebelumnya, para ahli ekonomi pembangunan, ahli kependudukan, dan ahli sumber daya manusia merumuskan pembangunan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia. Paradigma ini menganggap bahwa pembangunan harus berorientasi pada manusia sebagai obyek dan subyek sekaligus. Paradigma ini menghilangkan dikotomi antara manusia sebagai pelaksana pembangunan dan manusia sebagai target yang harus ditingkatkan kesejahteraannya.

Paradigma ini membangun manusia secara utuh dan totalitas. Hal ini disebabkan sumber daya manusianya dibangun sesuai dengan kebutuhan fisik (materi) dan kebutuhan psikis (sikap mental). Oleh karenanya SDM menjadi penentu keberhasilan pembangunan. Mulai dari perencanaan, monitoring, dan evaluasi hasil pembangunan, yakni: jumlah penduduk, struktur umur, komposisi, penyebaran penduduk, pendapatan dan distribusinya, tingkat pendidikan, mobilitas, dan kesempatan kerja dan kesehatan melibatkan sumber daya manusia.

5. **Paradigma Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Paradigm*)**

Paradigma ini muncul pada tahun 1970 ketika *Club of Rome* mengangkat studi tentang keterbatasan pertumbuhan (*The Limit of Growth*). Studi ini menjelaskan bahwa pertumbuhan

yang diharapkan dalam pembangunan selama ini akan berakhir kurang dari 100 tahun. Hal ini disebabkan sumber daya alam yang ada akan terkuras habis.

Pemecahan atas persoalan ini memperkuat argument politik diatas. Karena jelas bahwa kekuatan-kekuatan pasar yang bebas – sepanjang dibenarkan berkembang menurut garis-garis kapitalisme tradisional akan segera menuju pada kebuntuan ekologi. Karena itu perkembangan Negara-negara terbelakang sekali momentum pertama telah dicapai harus menemukan cara untuk penghematan bahan dan produksi sampai pada tingkat yang belum dikenal di Barat sekarang. Pemborosan-pemborosan sumber-sumber seperti pemakaian mesin cuci, televisi, dan alat-alat rumah tangga yang meniru gaya penghidupan Barat tidak mungkin untuk ditiru oleh seluruh dunia.¹²

Gagasan yang ada dalam paradigma ini belum terbukti, tetapi menyadarkan bahwa betapa pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang lestari. Jika umat manusia menginginkan hidup sejahtera, maka harus memperhatikan keseimbangan ekologi dan ekosistem. Paradigma ini berharap masa depan bumi tidak akan terguncang hanya karena kesewenangan manusia dalam mendapatkan fasilitas yang terkandung didalamnya. Jika efisiensi merupakan konsep ekonomi dan keadilan ekonomi merupakan konsep ekonomi yang didasarkan pada etika, maka konsep berkelanjutan (sustainable) adalah gabungan antara faktor-faktor ekonomi, fisik, sosial, dan politik. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan

¹² Robert L. Heilbroner, *Terbentuknya Masyarakat Ekonomi*, terj. Sutan Djanjung (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 308.

yang memberi manfaat pada semua (warga masyarakat) termasuk generasi mendatang secara adil dan merata.¹³

6. **Paradigma dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan** (*General Public Participation Paradigm*)

Paradigma ini muncul dalam rangka kritik terhadap pembangunan yang direncanakan secara terpusat (*central planning*). Paradigma ini berharap bahwa seluruh masyarakat turut serta berpartisipasi dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasinya. Partisipasi yang besar dalam pembangunan dapat diperankan masyarakat sesuai dengan kebutuhan kebutuhannya. Partisipasi masyarakat dapat berupa partisipasi politik, partisipasi ekonomi, pendidikan, hukum, dan sosial.

Tanpa adanya keterbukaan terhadap kritik, sebenarnya pembangunan sedang berjalan menuju pada proses pembusukan yang semakin dalam. Satu-satunya jalan untuk mempertahankannya adalah dengan memberi kesempatan bagi setiap kepentingan dari semua golongan untuk mendapatkan pemenuhannya. Untuk itu, menguatnya kesadaran politik masyarakat luas yang muncul dalam kritik-kritik terhadap ideologi pembangunan perlu menjadi bahan pertimbangan dalam membuat desain pembangunan di masa datang. Menguatnya isu pemberdayaan (*empowerment*) dalam pembangunan semakin terasa desaknya, sehingga tanpa adanya perhatian terhadap

¹³ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2000), 217.

kenyataan ini, keberlangsungan (*sustainable*) pembangunan justru sedang berada pada posisi terancam.¹⁴

7. **Paradigma Pembangunan Mandiri (*Self Reliant Paradigm*)**

Paradigma ini berangkat dari upaya untuk menghilangkan ketergantungan dalam melaksanakan pembangunan (*dependensia*). Paradigma ini mengembangkan teknologi sendiri tanpa mengambil (*impor*) dari luar. Negara-negara yang menggunakan paradigma ini adalah India pada masa Mahatmagandhi, Cina pada masa Maozedong, Tanzania pada masa Julius Nyerere, dan Indonesia pada masa Bung Karno yang terkenal dengan istilah berdikari (*berdiri diatas kaki sendiri*). Namun dalam kenyataannya paradigma ini juga gagal dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Bahkan paradigma ini juga tidak sesuai dengan kondisi yang melilit negara berkembang itu sendiri.

Dengan meninggalkan pengaruh Barat yang kapitalistis, Indonesia mulai berputar haluan berpaling ke kiri untuk menerima tawaran konsep dari Uni Soviet dan RRC, yakni revolusi untuk membebaskan diri sepenuhnya dari cengkeraman pangaruh Barat, yaitu imperialisme baru dalam bentuk penguasaan perdagangan dan penciptaan interdependensi yang mengakibatkan banyak Negara berkembang tergantung pada Negara maju, yang bukan merupakan hubungan timbal balik. Maka dengan lantang Sukarno mengumandangkan gema revolusi Indonesia dan mengangkat dirinya sebagai Panglima Besar Revolusi. Kemudian muncullah konsep-konsep berikutnya, dibidang politik luar negeri menganut konsep konfrontasi, untuk

¹⁴ A. Prasetyantoko, *Arsitektur Baru Ekonomi Global, Belajar dari Keruntuhan Ekonomi Asia Tenggara* (Jakarta: PT. Elex Komputindo, 2001), 111.

merangsang dinamika rakyat, dibidang ekonomi ditelurkan konsep berdikari, berdiri diatas kaki sendiri.¹⁵

8. **Paradigma Syari'ah (Syari'ah Paradigm)**

Paradigma ini muncul seiring dengan semangat umat Islam untuk berusaha menerapkan ajaran syari'ah dalam perekonomian. Paradigma ini menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat akan dapat tercapai bila seluruh aktivitas manusia berlandaskan syari'ah atau hukum-hukum Tuhan. Meskipun belum semua meyakini akan keampuhannya dalam menyelesaikan masalah-masalah perekonomian, sosial, politik, hukum, budaya, dan berbagai masalah alam, namun paradigma ini memberikan pemahaman yang sempurna tentang alam semesta, yakni : langit, bumi, dan segala isinya termasuk manusia sebagai khalifah didalamnya.

EKONOMI ISLAM

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh umat manusia dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kegiatan ekonomi Islam sebagai madzab ekonomi tersendiri memiliki pengertian yang berbeda dengan madzab ekonomi yang sebelumnya. Berikut ini beberapa pendapat tentang pengertian ekonomi Islam :¹⁶

1. Islam yang didalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditujukan oleh madzab ini, yaitu tentang ketelitian

¹⁵ Doddy Rudianto, *Pembangunan Ekonomi dan Perkembangan Bisnis Di Indoensia* (Jakarta: Golden Terayon, 1985), 15.

¹⁶ Ibid., 17.

cara berpikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah umat manusia.

2. Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'ān dan as Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya
3. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar dan siasat ekonomi Islam

Pengertian diatas memberikan perbedaan yang besar dengan madzab ekonomi sebelumnya. Adapun yang menjadi ciri-ciri dan nilai-nilai dasarnya adalah : ¹⁷

1. Ekonomi Islam merupakan bagian dari Sistem Islam secara keseluruhannya. Islam adalah agama yang multi komplit, multi faktual, dan multi dimensi dalam memenuhi kehidupan makhlukNya. Termasuk didalamnya adalah kehidupan berekonomi. Ketinggian tata nilai Islam jauh berbeda dengan semua agama. Islam memiliki kekuatan hukum, perundang-undangan, tatakrama, dan tingkah laku. Oleh karena itu sangat tidak adil bila petunjuk kehidupan yang lengkap ini dipisah-pisahkan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. ¹⁸

¹⁷ Ibid., 21 - 37.

¹⁸ Mahmud Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, terj. Achmad Rais (Jakarta : Gema Insani Press, 1991), 15.

- a. Kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat pengabdian Pekerjaan apapun yang dilakukan oleh muslim, baik itu pekerjaan ekonomi ataupun bukan bisa berubah dari pekerjaan material biasa menjadi ibadah yang berpahala apabila orang muslim tadi dalam pekerjaannya bermaksud mencari keridhoan Allah Swt.
- b. Kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat luhur. Kedua madzab ekonomi menjadikan materialisme sebagai orientasinya. Sehingga mereka saling bertengkar untuk bersaing, memonopoli pasar-pasar dan sumber-sumber bahan baku. Persaingan ini memunculkan perang dunia baik yang pertama maupun yang kedua, bahkan memicu untuk terjadinya perang dunia ketiga atau perang nuklir antara blok kapitalisme dan sosialisme. Madzab ekonomi Islam dalam setiap aspek kegiatan ekonominya selalu mengedepankan kerjasama dan bagi hasil sehingga yang terjadi adalah sifat luhur saling tolong-menolong.
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam Islam adalah pengawasan yang sebenarnya, yang mendapat kedudukan utama. Penyelewengan kegiatan ekonomi oleh sebagian pelaku ekonomi dikarenakan lemahnya pengawasan yang hanya mengandalkan kontrol negara. Dalam lingkungan ekonomi Islam ditanamkan pengawasan hati nurani yang terbina atas keyakinan akan adanya Allah Swt dan perhitungan hari akhir. Seorang muslim akan merasa tidak mampu lepas dari pengawasan Allah Swt meskipun ia bisa lepas dari pengawasan kekuasaan manusia. Pengawasan dalam bentuk seperti inilah yang menjamin keselamatan tingkah laku masyarakat

dan menghilangkan penyelewengan-penyelewengan kegiatan ekonomi.¹⁹

2. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan Individu dan Kepentingan Masyarakat. Cita-cita luhur ekonomi Islam adalah melaksanakan misi sebagai khilafah di bumi dengan tugas memakmurkannya. Seorang muslim berkeyakinan akan mempertanggungjawabkan kewajibannya ini dihadapan Allah Swt. Keuntungan material yang dicapai dalam kegiatan ekonomi, bagi seorang muslim adalah menjadi tujuan perantara untuk meraih cita-cita insani berupa kepatuhan kepada Allah Swt. Dengan kata lain cita-cita ekonomi Islam bukanlah menciptakan persaingan, monopoli, atau mementingkan diri sendiri dengan mengumpulkan semua harta kekayaan dunia dan mencegahnya dari orang lain, sebagaimana yang terjadi pada sistem ekonomi penemuan manusia. Cita-cita ekonomi Islam merealisasikan kekayaan, kesejahteraan hidup, dan keuntungan hidup bagi seluruh masyarakat disertai niat melaksanakan hak khilafah dan mematuhi perintah Allah Swt.

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam sebagaimana yang diuraikan diatas menunjukkan bahwa terdapat keterpaduan antara unsur materi dan spiritual, unsur keduniaan dan keakhiratan, dan unsur individu dan masyarakat. Keseimbangan unsur-unsur ini akan berdampak pada keberhasilan dan kesuksesan seseorang dan masyarakat dalam mencapai cita-citanya.

¹⁹ Abul A'la Al Maududi, *Masalah Ekonomi dan Pemecahannya Menurut Islam*, terj. Adnam Syamni (Jakarta : Media Dakwah, 1985), 43.

PEMBANGUNAN BERBASIS EKONOMI ISLAM

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pandangan ekonomi Islam harus memiliki tujuan yang jauh, yakni berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhiratnya. Pembangunan tidak boleh hanya berkaitan dengan *maṣlahah* dunia saja, tetapi juga harus dihubungkan dengan yang lebih abadi (*transcendental*). Oleh karenanya, pembangunan harus merujuk atau didasarkan pada ketentuan syari'ah, baik dalam bentuk firman Tuhan, sabda Rasul, *ijma*, *qiyās*, maupun *ijtihad* para ulama fakih.

Pembangunan manusia secara utuh telah menjadi target pertama dalam ekonomi Islam. Dengan kata lain, pembangunan tidak sekedar membangun ekonomi rakyat, tetapi juga membangun sikap mentalnya (*mental attitudes*). Pembangunan juga tidak sekedar kebutuhan jasmaninya, tetapi juga kebutuhan rokhannya. Kebutuhan rokhani yang terbangun akan secara otomatis mendorong kemandirian, dan kesadaran yang tinggi bagi setiap orang untuk membangun dirinya, dan membangun bangsa dan umat manusia.

Membangun bangsa dan umat manusia yang selalu memandang kemaslahatan dunia dan akhirat dalam pandangan ekonomi Islam diarahkan dalam lima bentuk perilaku. Perilaku yang membangun tersebut adalah :²⁰

1. Perilaku yang diperintahkan (Wajib)

Bangsa dan umat manusia ini harus melakukan kegiatan yang diperintahkan dalam kehidupannya, khususnya bidang perekonomian. Bila tidak dilakukan maka akan berdampak pada kehidupannya di akhirat berupa sanksi dan

²⁰ Aedy, *Teori*, 29-30.